

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
DAFTAR ISI	1
A. Pendahuluan.....	2
1. Latar Belakang	2
2. Tujuan dan Manfaat	3
3. Ruang Lingkup.....	4
B. Metodologi Pelaksanaan FKP.....	5
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP.....	5
3. Metode Pelaksanaan FKP	5
4. Susunan Acara FKP	5
C. Hasil Pelaksanaan FKP.....	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Analisis.....	7
3. Rencana Aksi.....	8
D. PENUTUP	10
Lampiran I Berita Acara yang Ditandatangani	
Lampiran II Salinan Daftar Hadir	
Lampiran III Surat Undangan	
Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan	

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah agar penyelenggara pelayanan dan masyarakat memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait kebijakan, syarat, ketentuan, dan prosedur terbaru dalam membuat penerima layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) Ruang partisipasi Masyarakat yang dijamin haknya oleh undang-undang pelayanan publik;
- b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengasawan yang dilakukan;
- d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik adalah “Standar Pelayanan Publik” yang telah disusun oleh Dinas Sosial Banjarbaru guna meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

B. Metodologi Pelaksanaan FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Juni 2024

b. Tempat Pelaksanaan : Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tanggal 04 Juni 2024 dihadiri sebanyak 50 Peserta. Peserta berasal dari Masyarakat Pengguna Layanan, Unsur Pemerintah, Akademisi, Forum RT/RW Kota Banjarbaru, Camat, Ombudman RI Kalsel, Tokoh Masyarakat, Stakholder (BPJS), Organisasi Masyarakat sipil dan Media Massa.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial menggunakan metode tatap muka dengan mengundang Masyarakat Pengguna Layanan, Instansi terkait, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Media Massa dengan

mendengarkan penyampaian tentang pelayanan dan inovasi Dinas Sosial, mendengarkan pendapat dan saran-saran dan masukan oleh Auditor FKP.

4. Susunan Acara FKP

Tabel 1. Susunan Acara FKP

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 - 09.15	Pembukaan Menyanyikan Lagu : 1. Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Banjarbaru 3. Banjarbaru Juara	MC / Umi Hani, AMTG
09.15 – 09.30	Pembacaan Doa	Suryani
09.30 - 09.45	Laporan Ketua Panitia	Bambang Supriyadi, SE, ME
09.45 – 10.15	Sambutan dan Arahan Walikota Banjarbaru An. Asisten III Kota Banjarbaru	Dr. Hj. Rahma Khairita, MM
10.15 – 10.30	Coffe Break	
10.30 – 12.30	Pemaparan Secara Panel Dan Tanya Jawab 1. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru 2. Direktur Dinas Sosial Kota Banjarbaru 3. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rokhyat Riyadi, SE, M.Si 2. dr. Danny Indrawardhana, MMRS 3. Kusnadi, S.sos., M.A.P Moderator : Bambang, SE, ME
12.30 – 12.35	Penandatanganan Berita Acara dan Maklumat Pelayanan	1. Asisten III Kota Banjarbaru 2. Kepala Dinas Sosial 3. Direktur RSDI 4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		<ol style="list-style-type: none">5. Perwakilan Pengguna Layanan6. Akademisi7. Organisasi Masyarakat8. Instansi Terkait9. Media Massa
12.35	Penutup	Foto Bersama

C. Hasil Pelaksanaan FKP

1. Identifikasi Masalah

- a. Pemerintah Daerah belum ada memfasilitasi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara agar mereka dapat memahami Khutbah Jum'at yang di sampaikan oleh Khotib.
- b. Tidak adanya bidang data dalam struktur Organisasi Dinas Sosial sehingga pengelolaan data belum optimal
- c. Maraknya anak punk perlu dilakukan penertiban
- d. Terkait peserta BPJS mandiri yang tidak mampu lagi membayar premi sehingga menunggak, apakah tunggakan bisa dibayarkan oleh Pemerintah Daerah/ dihapuskan?
- e. Bagaimanakah solusinya agar peserta BPJS yang menunggak dapat menggunakan BPJS kembali?
- f. Mengapa masih terdapat Penerima bantuan sosial yang tidak sesuai?

2. Analisis

- a. Dinas Sosial akan mengupayakan menyediakan Juru Bicara Isyarat sebagai penterjemah pada saat Khotib menyampaikan khutbah, sebagai percontohan dapat dilakukam di Mesjid Agung yang dibina oleh Pemerintah Daerah.
- b. Akan diusulkan untuk perubahan SOTK melalui Bagian Organisasi.
- c. Dinas Sosial akan bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban
- d. Tunggakan tidak dapat dihapuskan, dan Pemerintah Daerah tidak dapat melunasi hutang tersebut. Namun Peserta BPJS silahkan datang ke Dinsos agar kepesertaannya dapat diaktifkan kembali. Adapun hutang masih tetap menjadi tanggungan peserta. untuk pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur sesuai program cicilan yang dilaksanakan oleh BPJS

- e. Kepesertaan BPJS aktif sejak pembayaran premi di bayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Untuk penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN, bukan berasal dari Dinas Sosial sehingga menyulitkan untuk pengawasan. Adapun bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, data berasal dari Kelurahan dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Rencana Aksi

Tabel 2. Rencana Aksi

No.	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	menyediakan Juru Bicara Isyarat sebagai penterjemah pada saat Khotib menyampaikan khutbah	2025	Mesjid Agung	Bidang Rehabilitasi Sosial	Akan dilaksanakan
2.	bekerjasama dengan Satpol PP untuk Penertiban Anak Punk	2024	Kota Banjarbaru	Bidang Rehabilitasi Sosial	Telah dilaksanakan
3.	Adanya Bidang Data dalam Struktur Organisasi Dinas Sosial	2025	Kota Banjarbaru	Dinas Sosial	Akan diusulkan peninjauan SOTK Ke Bagian Organisasi

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP maka Dinas Sosial Kota Banjarbaru berkomitmen untuk :

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
2. Adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
3. Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Lampiran I. Berita Acara yang Ditandatangani



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) STANDAR PELAYANAN (SP) PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa, 04 Juni 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2024. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pemerintah Daerah belum ada memfasilitasi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara agar mereka dapat memahami Khutbah Jum'at yang di sampaikan oleh Khotib.	Akan mengupayakan menyediakan Juru Bicara Isyarat sebagai penterjemah pada saat Khotib memnyampaikan khutbah, sebagai percontohan di Mesjid Agung yang dibina oleh Pemerintah Daerah	Akan diusulkan menjadi rencana kegiatan
2.	Tidak adanya bidang data dalam struktur Organisasi Dinas Sosial sehingga pengelolaan data belum optimal	Akan diusulkan untuk perubahan SOTK	Pengusulan ke Bagian Organisasi untuk peninjauan SOTK
3.	Maraknya anak punk perlu dilakukan penertiban	Dinas Sosial akan bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Satpol PP
4.	Terkait peserta BPJS mandiri yang tidak mampu lagi membayar premi sehingga menunggak, <ul style="list-style-type: none">● apakah tunggakan bisa dibayarkan oleh Pemerintah Daerah/ dihapuskan?● Bagaimanakah solusinya agar peserta BPJS tersebut dapat menggunakan BPJS kembali?	<ul style="list-style-type: none">● Tunggakan tidak dapat dihapuskan, dan Pemerintah Daerah tidak dapat melunasi hutang tersebut. Namun Peserta BPJS silahkan datang ke Dinsos agar kepesertaannya dapat diaktifkan kembali.● Kepesertaan BPJS aktif sejak pembayaran premi di bayarkan oleh Pemerintah Daerah.● Adapun hutang masih tetap menjadi tanggungan peserta● untuk cara pembayaran, BPJS mempunyai program cicilan.	Telah berjalan
5.	Masih terdapat Penerima bantuan sosial yang tidak sesuai	<ul style="list-style-type: none">● Untuk penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN, bukan berasal dari Dinas Sosial sehingga menyulitkan untuk pengawasan.● Adapun bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, data berasal dari Kelurahan dan dapat dipertanggungjawabkan.	Telah Berjalan

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 04 Juni 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749

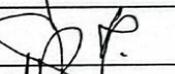
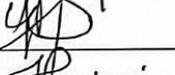
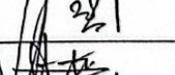
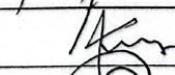
NO	NAMA & NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Maulana A	L	Ombudsman	
2.	I Dewa Ayu Kade Sartika Dewi	P	BPJS	
3.	Hj. Rahkmatiah	P	Biro Organisasi Provinsi	
4.	Maslih Amberi	L	FKUB	
5.	Rudy Rakhmana	L	LPM BBU	
6.	Fikri Izzanudin	L	Media Pojok Banua	

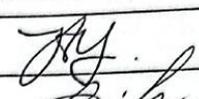
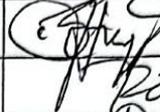
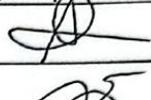
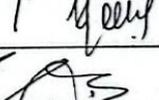
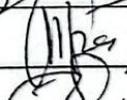
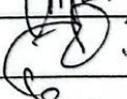
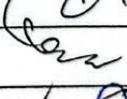
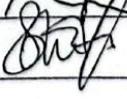
<p>An. Wali Kota Banjarbaru Asisten Administrasi Umum</p> <p>Dr. Hj. Rahma Khairita, MM</p>	<p>Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru</p> <p>Rokhyat Riyadi, SE, M.Si</p>
---	--

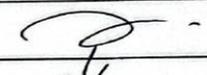
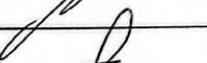
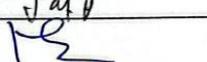
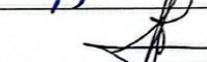
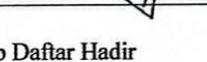
Lampiran II. Salinan Daftar Hadir

DAFTAR PESERTA RAPAT

Hari : Selasa
 Tanggal : 4 Juni 2024
 Pukul : 09.00 Wita - Selesai
 Tempat : Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru
 Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Pemko Banjarbaru

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	MARDIANA	SENTRA BUDI LUKUR	
2	Rina Misa R.	Icec. Ceupatka	
3	I Dewa Ayu Lado	BBS Kes. Banjarbaru	
4	Bambang Suratno	Kel. Guntung Paikot	
5.	Sri Gino AW	tee BBS	
6	Kusnadi	Inspektur	
7.	H. Akhmad Yau	Inspektur	
8	Muhammad Hasim	Organisasi	
9	M. Aswin Rosadi	organisasi	
10	Jahromun	PerD	
11.	Rokiyat R.	banjar	
12	Lili M	Dinso	
13	VANTOSO	CPMK. S. BSA-	
14.	KEUK.	F.RS/PW S.VLIV	
15.	H. Pukimin	DPC-LPM BBS	
16	Agus. Salim	LPMK Lulin Barat	
17	H. Sudarm	LPMK. G. Paikot	
18	Ponardi	LPM Lok-ut	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
	A. Kusari	Upnk. Kemung	
	Rudy Ratnuana.	LPM kee. BBU.	
	Asriansyah	LPMK Bangkal	
	Filant Lesudin	Meda / popobanna	
	Amoy. T	Dinas Sosial	
	Maulana Athmadi	Ombudsman RI (sabel)	
	Dr. Denny I	BSD Idera	
	siti Ramlah	LSM. Ruang Pelita Kalimantan	
	Muslih Amberi	FKUB Banjarmasin	
	NOVI Mardiana	LSM. Ruang Pelita Kal.	
	ahyuni	kei - st	
	H. Syafrullah	Lpue Rec. Cempaka	
	AHMADUK	Lpm gulung Parigi	
	Hooraida Ferris	Dinsos	
	Eri Fransineta	Ketua Forum Utkin	
	PHOTO WARNO	FRT RW BBU	
	(Bued. Sofaf	Forum 20/10/11	
	DIREKTI INDIRASARI	DURCEBIL PROV	
	Nandi.	Lpm Ri. udi	
	dr. Jhel Puyti	Ditmas / Dinas	
	RADEN ULTRA	FTW kee. LU	
	AHMAD	F-RT / RW BBS	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
	Dr Rli Mingsel	RSD Idam	
	SAYUDI	Kec. BBU	
	Ki SWOND	UPM ke Loe Keli	
	H. Mukhyor M.	Forum RT RW Syamsudin	
	Supriyanto	Lpanti/Sym reso	
	NURDIN	FVR	
	Abel	Kompas TV	
	Rachmatiah	Br Organisasi	
	Reswan Madi	Kc. LU	
	Wailani	K.Por Cengaba	

Penanggung Jawab Daftar Hadir

.....

Lampiran III. Surat Undangan



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511)
4772569 Fax. (0511) 774269

Banjarbaru, 31 Mei 2024

Nomor : 000.8.3.4/225/V/ORG/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. (daftar terlampir)
di
tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik UPP Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dan menindaklanjuti amanat PerMenpan nomor 16 tahun 2017 dimana setiap UPP dalam merancang, menerapkan dan mengevaluasi setiap kebijakan terkait pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Bagian Organisasi akan memfasilitasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) berupa review Standar Pelayanan pada Disdukcapil, Dinsos, dan RSDI tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa / 04 Juni 2024
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Aula Gawi Sabarataan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru,



Drs. H. Said Abdullah, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196509281992031008

DAFTAR TERLAMPIR

No	Nama Daftar Undangan
1.	Ketua Komisi 1 DPRD Banjarbaru
2.	Ketua Forum RT/RW Kecamatan dan Kelurahan
3.	Ketua LPM Kecamatan dan Kelurahan
4.	Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan
5.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Camat Se-Kota Banjarbaru
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
9.	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat
10.	Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
11.	Dekan Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat
12.	Dekan Politeknik Kesehatan
13.	Kepala BPJS Kota Banjarbaru
14.	Ketua Yayasan Pendidikan Borneo Lestari
15.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarbaru
16.	Ketua LSM Pelita
17.	Ketua LSM KitaBisa.com
18.	Ketua LSM Teras Inklusi
19.	Ketua Kadin Banjarbaru
20.	Ketua PPJI Banjarbaru
21.	Ketua APJI Banjarbaru
22.	Ketua Sentra Budi Luhur
23.	Media Elektronik
24.	Media Non Elektronik

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan



